

Monitoring & Evaluasi

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)

Pemerintah Kota Semarang

2023



Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4



Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawaii Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

- 1. MEMALSUKAN SURAT DOKTER/ SURAT TUGAS
- 2. Data Dukung belum dilampirkan/ tidak sesuai/ tidak dapat terbaca (Dinas Luar/Surat Tugas, Surat Dokter, Surat Cuti Umroh, Surat Konfirmasi Kehadiran, Dispensasi, Jadwal Piket untuk yang Shift)



- 3. Kesalahan dalam Melakukan pemotongan:
 - a) Lupa tidak dilakukan pemotongan (Cuti Alasan Penting, Tidak Mengikuti Apel, Konfirmasi, Salah kamar Presensi, dan Presensi tidak terekam);
 - b) Salah dalam memberikan pemotongan

Contoh:

- a. CAP harusnya dipotong 2,5%/hari namun dalam usulannya tidak potong
- b. Terdapat konfirmasi 5 kali dengan surat keterang (harusnya 3 kali potongan 0,5% dan ditambah 2 kali potongan 2,5%) namun diusulan tpp 2,5% dikali 5

- 4. Belum disesuaikannya kekurangan jam kerja pada pegawai yang terlambat/ Salah melakukan presensi sehingga mengakibatkan kekurangan Jam Kerja lebih dari 4 Jam karena tidak melaporkan ke BKPP Kota Semarang.
- 5. Kesalahan dalam penentuan tarif tpp, sehingga terdapat pegawai yang melakukan pengembalian dan terdapat pegawai yang mengusulan kekurangan.

Contoh:

Pada presensi terdapat keterlambatan 8 jam karena salah melakukan presensi, maka harusnya disesuaikan keterlambatan menjadi 4 jam

- 6. Kesalahan nominal pegawai mutasi masuk pemkot
- 7. Pegawai yang sedang diklat tidak membuat e-kinerja bulanan dan aktivitas harian
- 8. Belum memasukan Data ASN yang meninggal dibulan sebelumnya padahal masih mendapatkan TPP dibulan berikutnya



- 9. SKP Bulanan dan Aktivitas harian belum diverifikasi atasan
- 10. Kesalahan dalam pengambilan Cuti Alasan Penting pada PPPK yang seharunya mengambil Cuti Tahunan
- 11. Atasan lupa menginputkan briefing/ terdapat pegawai yang belum masuk mengikuti brifing



- 12. Tidak menyelesaikan proses download dengan benar, sehingga data tidak lengkap
- 13. Belum disesuaikan golongan pegawai sehingga pajak tpp pegawai tersebut belum masuk
- 14. Tidak untuk mengubah cuti pada pengajuan cuti yang sudah dibuat



DAFTAR OPD YANG MENGALAMI KENDALA TPP

Januari s.d. Juni

DISBUDPAR

PUS BANGETAYU

PUS KARANGMALANG PUS MANGKANG PUS TLOGOSARI KULON

DP3A

SATPENBANYUMANIK

SATPEN NGALIYAN SATPEN TEMBALANG SATPEN TUGU

DISDAG

DISPERTAN

KEC GAYAMSARI KEC SMG TENGAH KEC SMG TIMUR

RSWN

BAG PEREKONOMIAN & SDA BAGIAN KESRA

PERTANYAAN



1.

KENDALA APA YANG DIHADAPI DALAM PENGUSULAN TPP?



2

KENAPA PENGAJUAN TPP SELALU TERLAMBAT?



https://smg.city/kuesmonevtpp2023

Terima Kasih



Monitoring & TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) Pemerintah Kota Semarang 2023

"Hanya karena mimpimu tertunda, bukan berarti **Tuhan** menolaknya. Semua akan **indah pada waktunya**."